

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **A. Dinamika Tenaga Kerja Indonesia**

Migrasi internasional Tenaga Kerja Indonesia (TKI) memiliki sejarah yang cukup panjang. Dimulai dari masa kolonialisme dan Orde Lama, TKI menjadi sasaran utama negara-negara besar, khususnya negara industri. Hal ini disebabkan negara industri tersebut tidak terlalu membutuhkan tenaga kerja berpendidikan tetapi hanya membutuhkan tenaga kerja dengan sedikit keterampilan sebagaimana TKI yang mempunyai etos kerja rendah jika dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN lainnya (Nasution, 1999).

Migrasi tenaga kerja Indonesia sudah dimulai sejak masa penjajahan. Pada tahun 1887, pekerja Indonesia dikirim ke beberapa negara jajahan seperti Kaledonia, Suriname, serta Belanda. Selama periode tersebut, pekerja Indonesia dipekerjakan dengan paksa sebagai kuli. Kebanyakan para pekerja ditempatkan di sektor perkebunan yang dimiliki penjajah (Irewati, 2003). Pada abad ke-20, migrasi pekerja Indonesia ke Malaysia terjadi secara besar-besaran dikarenakan pada saat itu Malaysia masih dalam jajahan Inggris dan banyak pemodal Inggris yang membutuhkan tenaga kerja di lahan yang mereka miliki (Nasution, 1997). Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1947, terbentuklah Lembaga Kementerian Perburuhan yang membuka jalan bagi para buruh untuk masuk ke bidang politik.

Pada tahun 1966, Presiden Soeharto mulai fokus dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Pada masa ini, sumber daya alam berupa minyak bumi menjadi sumber kekuatan yang cukup kuat pengaruhnya terhadap tumbuhnya investasi asing di Indonesia sehingga migrasi tenaga kerja Indonesia tidak lagi menjadi penopang ekonomi. Pada tahun 1983, Pemerintah melakukan perombakan kebijakan sebagai langkah dalam meningkatkan pendapatan luar negeri yang turun diakibatkan harga minyak dunia yang jatuh. Alhasil, Pemerintah Indonesia membangun perekonomian yang berbasis tenaga kerja murah sehingga menarik investor asing untuk menggunakan jasa tenaga kerja Indonesia (Tirtosudarmo, 2002). Kebijakan tersebut tentunya terjadi akibat tingginya angka pengangguran di Indonesia.

Pada masa Orde Baru, Kementerian Perburuhan diganti menjadi Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1970. Depnaker kemudian membuat kebijakan untuk mengurangi pengiriman tenaga kerja tidak terdidik dan meningkatkan pengiriman tenaga kerja terdidik. Hal ini disebabkan karena banyaknya masalah yang terjadi pada tenaga kerja tidak terdidik, seperti: pelecehan seksual, kekerasan, bahkan dipulangkan. Peraturan tersebut memberikan wewenang kepada Pemerintah dan pihak swasta untuk mengatur jalannya proses pengiriman tenaga kerja ke luar negeri (Irewati, 2003).

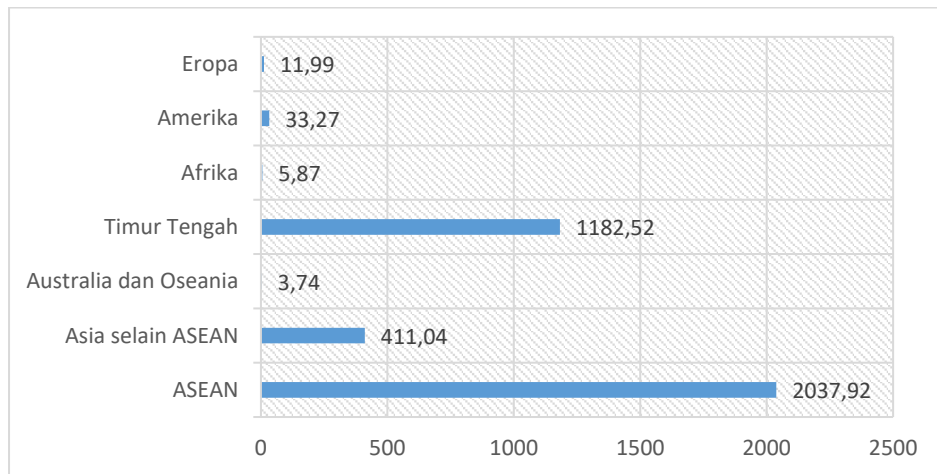
Pada tahun 1988, jumlah migrasi TKI yang dikirim ke Arab Saudi semakin meningkat. Kementerian Tenaga Kerja mengeluarkan Peraturan No. 1307 mengenai petunjuk teknis pengarahan TKI ke Arab Saudi. Arab Saudi

menjadi negara tujuan utama TKI untuk bekerja di sektor domestik (Nasution, 1999). Sementara pada awal dekade 80-an, migrasi tenaga kerja Indonesia cenderung meningkat di Malaysia untuk sektor perkebunan dan konstruksi melalui perjanjian kesepakatan mengenai pengaturan aliran migrasi dari Indonesia ke Malaysia pada tanggal 12 Mei 1984 yang dikenal sebagai *Medan Agreement* (Susilo dkk, 2013).

Pada masa reformasi, Presiden Habibie menggantikan posisi Soeharto. Masa Pemerintahan Presiden Habibie terbilang sangat cepat namun memiliki sejarah yang cukup baik untuk Indonesia. Di masa kepemimpinannya, Indonesia masih berada pada Pelita VI. Pada masa ini, dampak krisis moneter berdampak pada meningkatnya pengiriman TKI dari 500.000 orang tenaga kerja pada Pelita V menjadi 1.250.000 orang. Hal tersebut dikarenakan oleh krisis tahun 1997 yang menyebabkan banyaknya penduduk Indonesia kehilangan pekerjaan mereka (Sabhana, 2012).

Memasuki awal masa kepemimpinan Presiden Megawati, kondisi migrasi Indonesia mengalami peristiwa besar dengan dipulangkannya sebagian besar tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Hal tersebut ditandai dengan keluarnya Akta Imigresen No. 1154 Tahun 2002 yang mengharuskan para migran ilegal membayar 10.000 ringgit Malaysia dan dihukum penjara maksimal lima tahun dengan enam kali hukuman cambuk. Hal tersebut yang melatarbelakangi Megawati membentuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

Pada era Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY), tingginya angka migrasi TKI ke luar negeri berbanding lurus dengan tingginya tingkat pengangguran. Hal tersebut dapat menjelaskan bahwa masalah perekonomian Indonesia dalam menyediakan lapangan pekerjaan masih belum teratasi. Manfaat yang didapatkan oleh Pemerintah dengan masuknya uang dari pengiriman tenaga kerja seharusnya ditopang dengan meningkatnya perlindungan terhadap migran yang bekerja. UU No. 39 Tahun 2004 tentang PPTKILN yang dibuat pada masa Megawati dilaksanakan pada era Pemerintahan SBY. Masa SBY merupakan masa yang paling banyak mengeluarkan kebijakan yang terkait dengan mobilitas migrasi. Pada Pemerintahan SBY yang kedua, jumlah migrasi internasional terus meningkat pesat. Terdapat 280.690 migran Indonesia pada tahun 2004, 474.310 migran pada tahun 2007, 561.241 pada tahun 2008, dan yang terakhir pada tahun 2009 sebesar 632.172 (Sabhana, 2012).

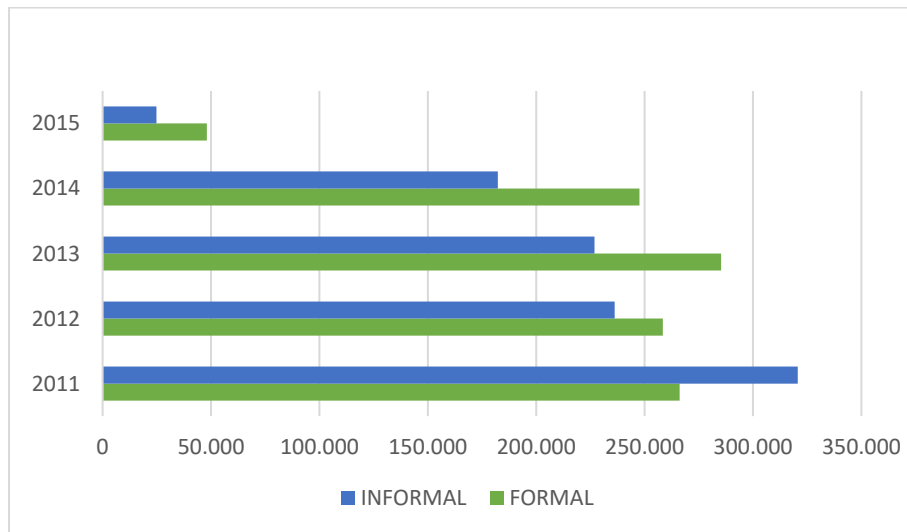


Sumber: Bank Indonesia

**Gambar 4. 1**

#### Jumlah TKI menurut Negara Penempatan dalam Satuan Ribuan Tahun 2015

Pada saat ini, TKI lebih banyak memilih untuk bekerja di negara-negara ASEAN dan Timur Tengah. Pada tahun 2015, sebanyak 2,04 juta jiwa Tenaga Kerja Indonesia lebih memilih untuk bekerja di negara-negara ASEAN terutama Malaysia sebanyak 1,88 juta jiwa, disusul Singapura sebanyak 120 ribu jiwa. Timur Tengah menjadi tempat favorit kedua setelah ASEAN untuk mencari pekerjaan, terbukti dengan jumlah TKI yang bermigrasi sebesar 1,12 juta jiwa pada tahun 2015. Arab Saudi menjadi negara tujuan utama TKI untuk bekerja yang diikuti oleh Uni Emirat Arab sebanyak 75 ribu jiwa.

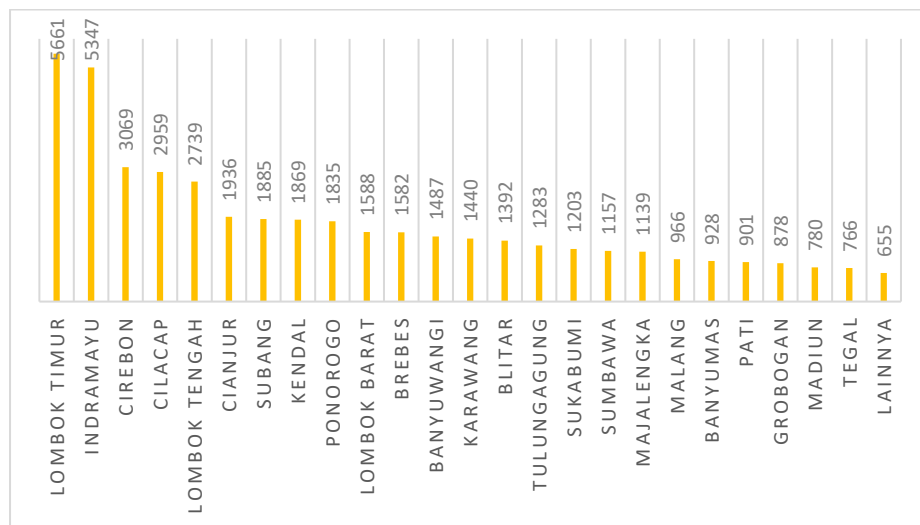


Sumber: BNP2TKI Tahun 2015 (diolah)

**Gambar 4. 2**

#### Penempatan Tenaga Kerja menurut Sektor Penempatan Tahun 2011-2015

Berdasarkan grafik di atas, terjadi penurunan jumlah tenaga kerja migran pada sektor formal. Sektor formal meliputi pekerja yang bekerja di pabrik, perkebunan/pertanian, konstruksi, konsultan, akuntan, guru/dosen, dokter, dan tenaga medis. Sedangkan kelompok informal meliputi pekerja rumah tangga. Dimulai pada tahun 2012, sektor formal mendominasi lalu turun drastis pada tahun 2015. Penurunan tersebut tidak hanya terjadi pada sektor formal, tetapi juga semua sektor terlihat menurun sangat banyak pada tahun 2015. Menurut BNP2TKI, penurunan ini disebabkan oleh pembenahan penempatan TKI pada beberapa negara seperti Timur Tengah, terutama ketika berlakunya moratorium TKI informal yang bekerja di sektor rumah tangga. Selain hal tersebut, penurunan jumlah TKI ini juga disebabkan oleh pengetatan syarat dalam bekerja seperti pemberlakuan durasi kerja yang dilakukan dengan *finger print*.



Sumber: BNP2TKI

**Gambar 4.3**

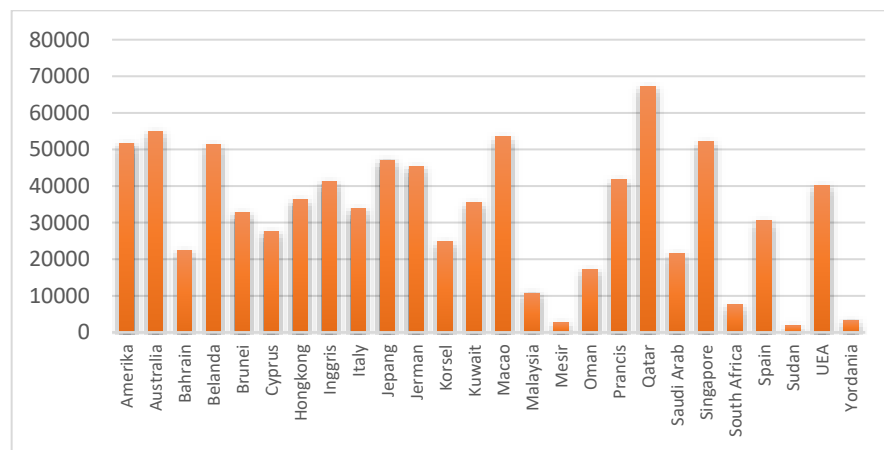
Jumlah TKI berdasarkan Asal Kabupaten per Maret 2015

Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi di mana terdapat beberapa kabupatennya seperti Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Sumbawa yang paling banyak dalam hal pengiriman TKI. Lombok Timur menjadi kabupaten dengan jumlah TKI terbanyak, yakni sebesar 5.561 jiwa, lalu diikuti oleh Indramayu sebesar 5.347 jiwa. Sementara itu, Tegal merupakan kabupaten pengirim TKI terendah, yaitu sebanyak 766 jiwa.

## **B. Pendapatan per kapita**

Kondisi ekonomi yang baik dapat dilihat dari ukuran ekonomi suatu negara. Ukuran ekonomi dalam hal ini, dinilai dari tingginya pendapatan per kapita negara tujuan. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian

pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Hal itulah yang menjadikan pendapatan per kapita sebagai indikator ukuran ekonomi suatu negara, karena semakin besar pendapatan per kapita suatu negara maka semakin baik juga kondisi perekonomian negara tersebut.



Sumber: *World Bank*

#### **Gambar 4. 4**

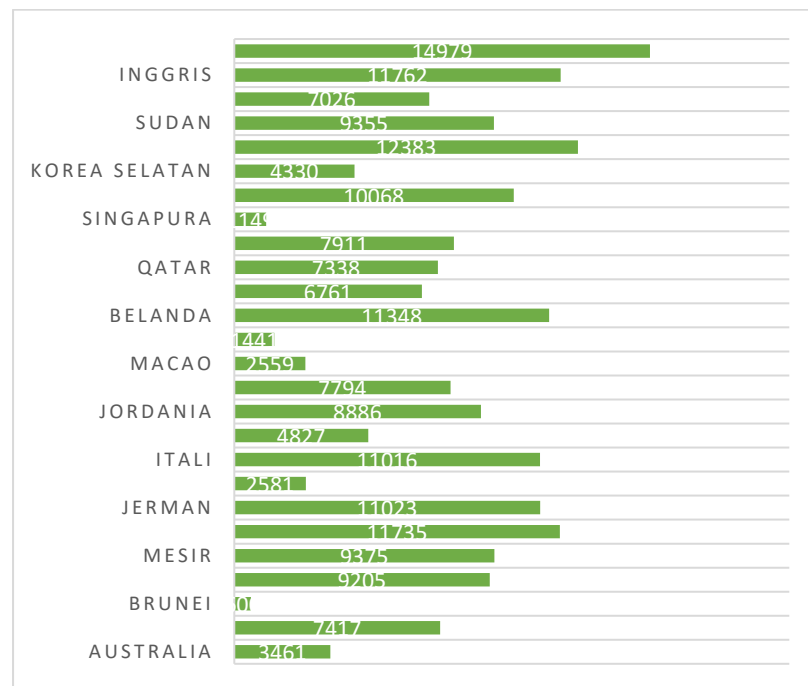
##### **Pendapatan Per kapita Negara Tujuan TKI Tahun 2015**

Pada grafik di atas, Qatar menjadi negara mitra dagang Indonesia yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi dibanding negara lainnya, yakni sebesar 67.277 juta USD, lalu di posisi kedua yaitu Australia dengan pendapatan per kapita 54.941 juta USD, dan selanjutnya diikuti Macao dan Singapore.



### C. Jarak

Jarak akan menentukan keputusan tenaga kerja untuk bermigrasi. Apabila jarak negara asal dengan negara tujuan semakin jauh tentunya akan menghambat keputusan migran, begitu juga sebaliknya.



Sumber: Distancefromto.net

**Gambar 4. 5**

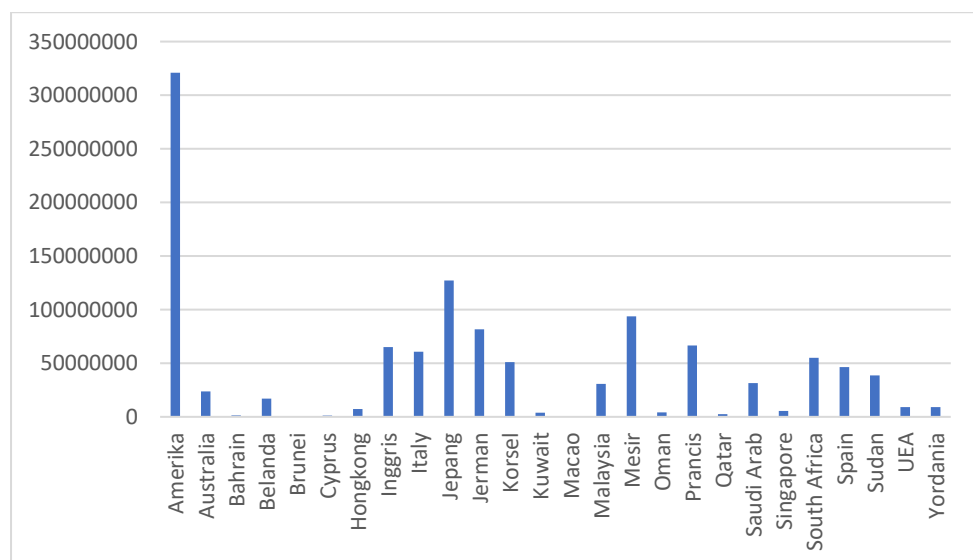
Jarak Indonesia dengan Negara Tujuan Migran Indonesia

Amerika Serikat menjadi negara tujuan migran Indonesia terjauh dengan jarak 14.979 km, kemudian Inggris di posisi kedua sejauh 11.762 km. Negara tujuan migran terdekat Indonesia adalah Brunei Darussalam, Singapura, dan Malaysia yang posisinya memang sangat dekat dengan

Indonesia, yakni masing-masing sejauh 600 km, 1.149 km, dan 1.441 km jika diukur dari ibukota masing-masing negara.

#### D. Populasi

Salah satu indikator penting dalam melihat pertumbuhan ekonomi suatu negara melalui peningkatan mutu sumber daya manusianya adalah dengan melihat jumlah populasi penduduk yang tinggal di negara tersebut.



Sumber: *World Bank*

**Gambar 4.6**

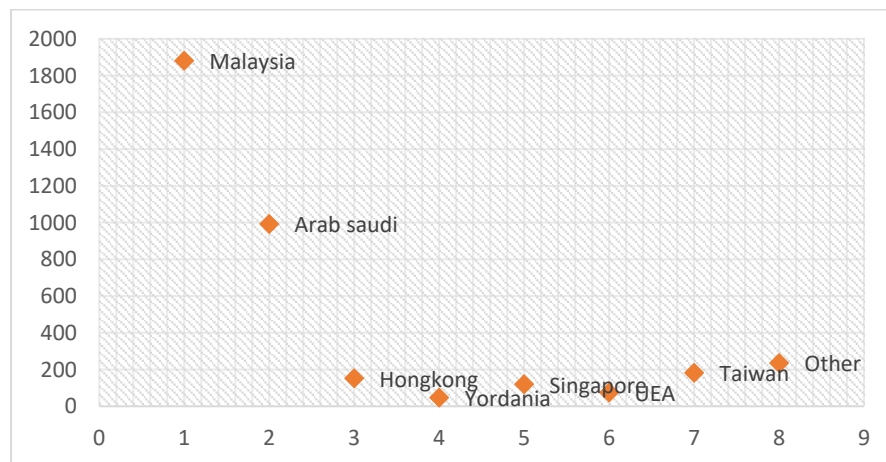
Total Populasi Penduduk Negara Tujuan TKI Tahun 2015

Dari 26 negara tujuan TKI Indonesia, Amerika menjadi negara dengan populasi terbesar, yakni sebanyak 320.896,616 jiwa, yang diikuti oleh Jordania sebesar 127.141.000 juta jiwa. Cyprus dan Mesir menjadi negara

dengan jumlah populasi terendah di antara negara-negara tujuan migran Indonesia, yakni masing-masing sebesar 417.542 jiwa dan 1.160.985 jiwa.

### E. Agama Mayoritas

Agama mayoritas suatu negara menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan keputusan migran untuk melakukan migrasi. Dengan melihat kesamaan agama antara daerah asal dan daerah tujuan akan menyebabkan migran lebih tertarik untuk melakukan migrasi dalam skala besar.



Sumber: Bank Indonesia

### Gambar 4. 7

Jumlah penempatan TKI Menurut Negara Tujuan Tahun 2015

Gambar 4.10 menjelaskan jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di negara lain. Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2015, jumlah TKI yang berada di Malaysia mendominasi jumlah TKI yang berada di

negara-negara lain, yaitu sebanyak 1,8 juta jiwa. Kemudian, negara kedua dengan jumlah TKI terbanyak adalah negara Arab Saudi dengan jumlah 992 ribu jiwa, sementara negara-negara lainnya berjumlah kurang dari 152 ribu jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa TKI cenderung lebih memilih bekerja ke negara dengan agama mayoritas penduduk yang sama dengan agama mayoritas di tempat asal.